BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan bagi Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapatkan perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah perdesaan, sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari Wahyuddin (2016).

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 memberikan perubahan secara signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. Dalam UU ini menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kebijakan tata kelola yang dimuat dalam UU desa yang

baru ini dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. beberapa kebijakan tersebut diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa beserta perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. adapun pula asas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

- 1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- 2) Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 1 Desember.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 pasal 86 menyatakan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sistem informasi desa yang dimaksud yaitu fasilitas perangkat desa, perangkat lunak, sumber daya manusia. serta jaringan yang berisi informasi berkaitan

dengan pembangunan desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.

Puteri (2014) Akuntabilitas sistem pengelolaan alokasi dana desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) Sebagaimana bahwa prinsip atau kaidah-kaidah *good governance* adalah partisipasi, transparansi, dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan.

Kusumastuti (2014) akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerja.

Sumpeno (2015) menyatakan akuntabilitas pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dana pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBdes) dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya.

Kabupaten Sleman mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahunnya ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk pembangunan wilayah perdesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) pada setiap tahun nya. Pada Kabupaten

Sleman terdapat 17 (tujuh belas) kecamatan dan 86 (delapan puluh enam) desa. Dalam penelitian ini penelitian lebih memfokuskan pada 5 (lima) kecamatan yakni Kecamatan Tempel, Kecamatan Godean, Kecamatan Minggir, Kecamatan Gamping dan Kecamatan Seyegan. Setiap kecamatan akan akan mendapatkan masing-masing Anggaran Dana Desa (ADD) dari pemerintah pusat setiap tahunnya.

Penerapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa didalam pasal 18 menyatakan bahwa “Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Dari seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. Alokasi dana desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali. Jenis kegiatan yang akan di danai melalui alokasi dana desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Tabel 1.1

Rincian Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017

NO	KECAMATAN/DESA	TAHUN ANGGARAN		
		2015	2016	2017
I	TEMPEL			
1	Banyurejo	327,201,000	738,117,000	947,269,000
2	Tambakrejo	322,555,000	714,319,000	915,972,000
3	Sumberrejo	316,248,000	682,006,000	873,477,000
4	Pondokrejo	321,363,000	708,209,000	907,936,000
5	Moroorejo	320,368,000	703,113,000	901,235,000
6	Margorejo	322,312,000	713,071,000	914,331,000
7	Lumbangrejo	319,081,000	696,517,000	892,560,000
8	Merdikorejo	316,531,000	683,454,000	875,381,000
	Jumlah	5,450,659,000	5,638,806,000	7,228,161,000
II	GODEAN			
1	Sidorejo	321,274,000	707,755,000	907,335,000
2	Sidoluhur	321,831,000	710,610,000	911,094,000
3	Sidomulyo	320,996,000	706,331,000	905,467,000
4	Sidoagung	313,477,000	667,554,000	854,471,000
5	Sidokarto	324,277,000	723,141,000	927,574,000
6	Sidoarum	325,036,000	727,026,000	932,684,000
7	Sidomoyo	321,609,000	709,470,000	909,596,000
	Jumlah	2,248,500,000	4,951,887,000	6,348,221,000
III	MINGGIR			
1	Sendangarum	308,780,000	643,745,000	823,159,000
2	Sendangmulyo	324,934,000	726,505,000	931,999,000
3	Sendangagung	326,305,000	733,526,000	941,232,000
4	Sendangsari	320,482,000	703,699,000	902,006,000
5	Sendangrejo	324,589,000	724,737,000	929,673,000
	Jumlah	1,605,090,000	3,532,212,000	4,528,069,000
IV	GAMPING			
1	Balecatur	1,629,021,025	1,716,471,000	1,722,909,000
2	Ambarketawang	1,508,507,820	1,596,644,000	1,605,164,000
3	Banyuraden	1,085,664,119	1,596,644,000	1,166,972,000
4	Nogotirto	1,108,853,911	1,177,731,000	1,179,176,000
5	Trihanggo	1,296,066,478	1,366,009,000	1,388,739,000
V	Jumlah	6,628,113,353	7,453,499,000	5,675,609,739
	SEYEGAN			
1	Margoluwih	333,143,000	768,560,000	987,306,000
2	Margodadi	330,632,000	755,696,000	970,388,000
3	Margomulyo	342,906,000	818,579,000	1,053,086,000
4	Margokaton	328,378,000	744,151,000	955,205,000
5	Margoagung	343,850,000	823,414,000	1,059,445,000
	Jumlah	1,678,909,000	3,092,639,579	5,025,430,000

Sumber : Pemerintah Kabupaten Sleman

Dilihat dari tabel 1.1 dengan memperhatikan pembagian dan penetapan Rincian Anggaran Dana desa dari Pemerintah Pusat Kabupaten Sleman pada tahun 2015, 2016 dan 2017 pada Kecamatan Tempel, Kecamatan Godean, Kecamatan Minggir, Kecamatan Gamping Dan Kecamatan Seyegan, masing-masing mengalami peningkatan pada tahunnya.

Faktor yang memengaruhi akuntabilitas dana desa yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa). Terdapat masalah pokok pada pelaksanaannya alokasi dana desa yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) handal yang tersedia dalam hal ini memungkinkan kurangnya profesionalitas aparat desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Berlatar belakang sarjana selebihnya adalah lulusan sekolah atas. (Sumber Pemerintah Kabupaten Sleman www.Slemankab.go.id)

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk menguji apakah pengaruh ketidakpahaman perangkat desa dalam memanfaatkan anggaran desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. dengan judul “PENGARUH PEMAHAMAN DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tempel, Godean, Minggir, Gamping, dan Seyegan Kabupaten Sleman Tahun 2018).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penulis adalah :

1. Apakah pemahaman perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penelitian hanya memfokuskan pada penelitian Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Di Wilayah Kecamatan Tempel, Kecamatan Godean, Kecamatan Minggir, Kecamatan Gamping, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman Tahun 2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pemahaman perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui apakah peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya, Khususnya bagi yang mengambil mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya Kecamatan Tempel, Kecamatan Godean, Kecamatan Minggir, Kecamatan Gamping Dan Kecamatan Seyengan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.6 Kerangka Penulisan

Penulisan skripsi perlu disusun dengan menggunakan sistematika tertentu untuk mempermudah dalam pengkajiannya. penulisan dalam skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan peneltian, manfaat masalah.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang akan dijadikan acuan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. dalam hal ini penulisan menggunakan teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, validitas dan reabilitas data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari serangkaian pembahasan, saran-saran, daftar pustaka, serta lampiran.